



## Wali Kota Siap Keluarkan Perwal Anggaran

■ Yulianingsih

**Wali kota akan berkonsultasi dengan Pemprov DIY terkait pengeluaran perwal.**

YOGYAKARTA — DPRD Kota Yogyakarta masih belum membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) 2014. Padahal masa penggunaan anggaran tahun ini hanya tinggal sekitar tiga bulan.

Karena dewan belum memberikan kepastian pembahasan APBD-P, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyiapkan opsi lain sebagai payung hukum untuk pemanfaatan anggaran. "Ini saatnya plan B dengan perwal (peraturan wali kota). Sudah tidak memungkinkan lagi dibahas anggaran perubahan," ujar Haryadi di Balai Kota Yogyakarta, Senin (27/10).

Haryadi mengatakan, opsi lain itu secepatnya akan dikeluarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004, ia mengatakan, kepala daerah dapat mengeluarkan perintah apabila dewan belum mengesahkan peraturan daerah (perda) APBD. Ia melihat opsi ini perwal ini perlu agar tidak mengganggu pelaksanaan penggunaan anggaran untuk kepentingan publik. Sehingga, menurut dia, kegiatan dan program Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun bisa tetap berjalan. Pada 2013, Haryadi mengatakan, perwal pun digunakan karena dewan belum mengesahkan perda APBD murni.

Untuk rencana pengeluaran perwal ini, Haryadi mengatakan, semua kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sudah dikumpulkan. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, juga dilakukan evaluasi serapan anggaran. Sebelum pengeluaran perwal, Haryadi mengatakan, akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi (pemprov). "Paling tidak akhir Oktober ini sudah terbit perwalnya," kata dia.

Sebelumnya Haryadi masih mencoba memahami kondisi yang terjadi

dalam tubuh DPRD. Ia pun masih berharap dewan akan dapat membahas anggaran, meski waktunya sudah mepet. Namun, Haryadi akhirnya mulai memikirkan alternatif lain setelah membahas tak kunjung terlaksana.

Mengenai materi yang dikonsultasikan ke Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, terkait dengan berbagai kegiatan yang dapat diakomodasi dalam perwal pemanfaatan anggaran. Ia mengatakan, kegiatan itu harus benar-benar yang dibutuhkan. "Sifatnya wajib mendesak dan mengikat kebutuhan," kata dia.

Menurut Kadri, Pemkot Yogyakarta rencananya akan mengusulkan tiga kegiatan dalam pengeluaran anggaran melalui perwal. Tiga kegiatan itu dianggap mendesak. Ia menyebut kegiatan itu adalah honorarium untuk tenaga bantuan, guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT) yang nilainya mencapai Rp 9 miliar. Selain itu, menurut dia, ada juga untuk pembiayaan listrik di dua instansi pemkot dan pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2014.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi mendukung pengeluaran perwal itu. Ia mengatakan, wali kota perlu segera mengeluarkan perwal sebagai pengganti perda APBD-P 2014. Ia menilai, perwal itu penting untuk anggaran honor tenaga bantuan, GTT, dan PTT.

Fahmi mengakui adanya dinamika dalam DPRD yang menyebabkan pembahasan APBD-P terhambat. Menurut dia, dinamika itu terkait dengan pembentukan alat kelengkapan (alkap) dewan. Saat ini, ia menyebut komunikasi informal sudah tidak menemui titik temu terkait pembentukan alkap itu. Ia mendorong untuk diadakannya mekanisme formal dalam pembentukan alkap, sehingga dewan dapat segera berfungsi secara optimal. Namun melihat kondisi ini, Fahmi pun menilai opsi perwal harus menjadi pilihan. "Perwal pengganti Perda APBD Perubahan sangat dibutuhkan," kata dia. ■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005